

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA  
DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI  
DESA TALANG KEBUN KECAMATAN LUBUK SANDI  
KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh :

**NORNI OKTAVIA**  
**NIM. 1611130132**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 1441 H / 2020 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Normi Oktavia, NIM 1611130132 dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu,            Juni 2020 M  
           Syawal 1441 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Andang Sunarto, Ph.D**  
**NIP. 197611242006041002**

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
**NIP. 198106122015032000**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”, oleh Normi Oktavia NIM: 1611130132, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2020/ 7 Dzulqa'dah 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 10 Agustus 2020 M

20 Dzulhijjah 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

  
Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP.195707061987031003

Penguji I

  
Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP.195707061987031003

  
Yunida Een Friyanti, M.Si

NIP.1981061220150320003

Penguji II

  
Andi Harpepen, M.Kom

NIDN. 2014128401

Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. Asnaini, M.A

NIP.197304121998032003

## MOTTO

**"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"**

**( Qs. Al-Baqarah :286)**

**Kesuksesan akan diraih dengan terus belajar tanpa mengenal lela dan air mata. Biarkanlah kaki yang lelah namu jangan semangat runtuh karena malas melangka.**

**(Norni Oktavia)**

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur beriring doa dan hati yang tulus dengan ini saya persembahkan karya teristimewaku yang telah aku raih dengan suka duka dan air mata. Pada yang peratama dan yang paling utama yang selalu menjadi detak semangat perjuanganku Allah SWT dalam namamu ya Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan sedihku juga kepada pimpinan yang penyayang yang selalu merindukan umatnya Nabi besar Muhamad SAW serta rasa terimakasih yang tulus aku ucapakan kepada orang tua aku yang telah berkerja keras, bertekad untuk menguliakan aku serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir keberhasilanku.

1. Ayahandaku yang bernama (Kasri) Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah.
2. Ibundaku yang bernama (Yahmi) yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu meberikan semangat, perhatian, kasi sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih bunda.
3. DangKakak (Nori Jrawan) yang selalu berkerja keras untuk membantu membayar uang kuliah, uang kosan, serta memberikan motivasi yang luar bisa dalam menyelesaikan studiku.

4. **Adeku (Vori Kelistian)** yang selalu memberikan doa, dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat menyelesaikan studiku.
5. **Seluruh dosen** yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibuk dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. **Seluruh keluarga besar dan sanak family** yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
7. **Seluruh Warga Desa Talang Kebun** yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Seluruh perangkat Desa Talang kebun**, yang selalu membantu saya dalam mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. **Sahabatku dari SMA (Lina Yuniarti)** yang selalu memberikan dukungan dan semangat padaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. **Untuk sahabat baikku meong (Sangga Rinsa Prastya)** yang selalu membantu dalam segala hal tanpa pamri serta meberikan motivasi yang luar bisa dalam menyelesaikan studiku.
11. **Sahabat-Sahabat yang tersayang (Ria Harmonis, Neli Gustin, Muhammad Qhairudin, Suci Dayanti, Wati, Rafi Erando, Ria Respika, Detri, yopi, Nova Andriani, Putri, Popy,)** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. **Teman-Teman Seperjuangan Ekonomi Syariah JAIN Bengkulu Angkatan 2016 di Kelas A, B, C, E, F, G, H, I** yang telah mengukir sebuah cerita disetiap hari-hariku.

**13. Teman-Teman KKN 99 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.**

**14. Almamaterku Tercinta, JAIN Bengkulu.**

**Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama dan pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa dicabut gelar sarjana, serta sanksi lain nya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2020 M  
Syawal 1441 H



**Norni Oktavia**  
**NIM. 1611130132**



## ABSTRAK

### **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap**

#### **Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Oleh Norni Oktavia, NIM 1611130132**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Hasil uji F secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat, dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai ( $\alpha$ ) 0,05 yang berarti ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Hasil uji t secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai ( $\alpha$ ) 0,05. Hasil uji t secara parsial variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,001 lebih besar dari nilai ( $\alpha$ ) 0,05. Dan hasil uji koefisien determinasi variabel akuntabilitas, transparansi dana berkontribusi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,255 atau sebesar 25,50 %.

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas dan transparansi dana desa, kepercayaan masyarakat*

## ABSTRACT

**The Effect of Village Fund Accountability and Transparency on  
Level of Trust in Talang Kebun Village  
Lubuk Sandi District, Seluma Regency  
By Norni Oktavia, NIM 1611130132**

*This study aims to determine the effect of village fund accountability on the level of trust Talang Kebun village Lubuk Sandi District Seluma District, the transparent influence of village funds on the level of trust Talang Kebun village Lubuk Sandi District Seluma District and the influence of accountability and transparent village funds on the level of trust Talang Kebun village, Lubuk Sandi District, Seluma Regency.*

*In this study using the type of field research with associative quantitative research methods. F test results simultaneously variable accountability, transparency and public trust, with a significance value of significance (Sig) of 0,000 less than the value ( $\alpha$ ) 0.05 which means there is an influence of accountability and transparent village funds on the level of trust in the village of Talang Kebun Lubuk District Seluma District Code. The partial t test results of the accountability variable that affect trust are indicated by the significance probability value (Sig) of 0,000 less than the value ( $\alpha$ ) of 0.05. The t-test results partially affect the transparency variable on public trust variables with a significance probability value (Sig) of 0.001 greater than the value ( $\alpha$ ) 0.05. And the test results of the coefficient of determination of the accountability variable, the transparency of funds contributing to the influence of public trust is indicated by the value of  $R^2$  (R Square) of 0.255 or of 25.50 %.*

**Keywords:** *Accountability and transparency of village funds, trust*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA TALANG KEBUN KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih seiring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Ibu Eka Sri Wahyuni, S.E, M.M, selaku Ketua Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Bapak Andang Sunarto, Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Yunida Een Fryanti, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

**Bengkulu, April 2019 M  
Syaban 1441 H**

**Norni Oktavia  
NIM. 1611130132**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                           | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                        | ii   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                  | iii  |
| <b>MOTTO</b> .....                                   | vi   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                             | vii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                 | ix   |
| <b>ABSTRAC</b> .....                                 | x    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                          | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                              | xiii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                           | xv   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                            | xvi  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                         | xii  |
| <br>   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |      |
| A. Latar Belakang .....                              | 1    |
| B. Batasan Masalah.....                              | 7    |
| C. Rumusan Masalah .....                             | 7    |
| D. Tujuan Penelitian .....                           | 8    |
| E. Kegunaan Penelitian .....                         | 9    |
| 1. Kegunaan Teoritis .....                           | 9    |
| 2. Kegunaan Praktis .....                            | 9    |
| F. Penelitian Terdahulu .....                        | 10   |
| G. Sistematika Penulisan .....                       | 15   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR</b>     |      |
| A. Kajian Teori .....                                | 19   |
| 1. Kepercayaan Masyarakat .....                      | 19   |
| a. Pengertian Kepercayaan .....                      | 19   |
| b. Indikator Kepercayaan Masyarakat .....            | 20   |
| c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan ..... | 21   |
| 2. Konsep Akuntabilitas .....                        | 24   |
| a. Pengertian Akuntabilitas .....                    | 24   |
| b. Macam-Macam Akuntabilitas .....                   | 25   |

|   |    |
|---|----|
| c. Dimensi Akuntabilitas .....                                    | 26 |
| d. Indikator Akuntabilitas .....                                  | 28 |
| e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas ....             | 28 |
| 3. Konsep Transparansi .....                                      | 30 |
| a. Pengertian Transparansi .....                                  | 30 |
| b. Indikator Transparansi .....                                   | 33 |
| c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi .....             | 34 |
| 4. Konsep Dana Desa .....   | 35 |
| a. Pengertian Dana Desa.....                                      | 35 |
| b. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang<br>No 6 Tahun 2004..... | 36 |
| B. Kerangka Berpikir .....  | 38 |
| C. Hipotesis .....  | 40 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....    | 41 |
| 1. Jenis Penelitian .....                   | 41 |
| 2. Pendekatan Penelitian .....              | 41 |
| B. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....        | 42 |
| 1. Waktu Penelitian .....                   | 42 |
| 2. Lokasi Penelitian.....                   | 42 |
| C. Populasi Dan Sampel .....                | 42 |
| 1. Populasi .....                           | 42 |
| 2. Sampel.....                              | 42 |
| D. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data ..... | 43 |
| 1. Sumber Data Penelitian .....             | 43 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data .....            | 44 |
| E. Variabel dan Definisi Operasional .....  | 44 |
| F. Instrumen Penelitian .....               | 44 |
| G. Teknik Analisis Data .....               | 45 |
| 1. Pengujian Kualitas Data .....            | 45 |

|  |    |
|--|----|
| a. Validitas .....                       | 45 |
| b. Uji Reabilitas .....                  | 46 |
| 2. Uji Asumsi Dasar .....                | 47 |
| a. Uji Normalitas .....                  | 47 |
| b. Uji Homogenitas .....                 | 47 |
| 3. Uji Asumsi Klasik .....               | 48 |
| a. Uji Multikononlinearitas .....        | 48 |
| 4. Pengujian Hipotesis .....             | 49 |
| a. Model Regresi Linear Berganda .....   | 50 |
| b. Uji Statistik t .....                 | 50 |
| c. Uji F .....                           | 51 |
| 5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ..... | 51 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum .....              | 52 |
| 1. Sejarah Desa .....               | 52 |
| 2. Demografi .....                  | 55 |
| 3. Keadaan Sosial .....             | 55 |
| 4. Sarana dan Prasarana .....       | 57 |
| 5. Keadaan Ekonomi .....            | 57 |
| 6. Kondisi Pemerintah Desa .....    | 57 |
| B. Hasil Penelitian .....           | 59 |
| 1. Data Deskripsi Responden .....   | 59 |
| 2. Pengujian Kualitas Data .....    | 60 |
| 3. Uji Asumsi Dasar .....           | 62 |
| 4. Uji Asumsi Klasik .....          | 65 |
| a. Uji Multikolonieritas .....      | 65 |
| 5. Pengujian Hipotesis .....        | 66 |
| a. Hasil Uji Regresi Berganda ..... | 66 |
| b. Hasil Uji t .....                | 67 |
| c. Hasil Uji F .....                | 68 |

|   |    |
|---|----|
| d. Pengujian Koefisien Determinasi .....  | 69 |
| C. Pembahasan .....   | 70 |
| 1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat<br>.....                  | 70 |
| 2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat<br>.....                   | 71 |
| 3. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap<br>Kepercayaan Masyarakat ..... | 72 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 75 |
| B. Saran .....      | 76 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Antara X dan Y

Gambar 4.1 Struktur Desa Talang Kebun Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembaran Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Data
- Lampiran 3 Uji Validitas Data Variabel  $X_1$
- Lampiran 4 Uji Reliabilitas Data  $X_1$
- Lampiran 5 Uji Validitas Data Variabel  $X_2$
- Lampiran 6 Uji Reliabilitas Data  $X_2$
- Lampiran 7 Uji Validitas Data Variabel Y
- Lampiran 8 Uji Reliabilitas Data Y
- Lampiran 9 Uji Normalitas
- Lampiran 10 Uji Homogenitas
- Lampiran 11 uji Regresi Berganda
- Lampiran 12 Uji Koefisiensi Determinasi
- Lampiran 13 Bukti Judul Diterima
- Lampiran 14 Bukti Plagiarisme Judul
- Lampiran 15 Bukti Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 16 Bukti Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 17 Halaman Pengesahan
- Lampiran 18 Surat Petunjukan
- Lampiran 19 Bukti Halaman Pengesahan Kuesioner
- Lampiran 20 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 21 Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 22 Surat Selesai Izin Penelitian
- Lampiran 23 Bukti Acc Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 24 Foto Bukti Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu langkah yang paling penting dalam menangani masalah kemiskinan adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian terutama di desa-desa. Salah satu upaya yang paling penting untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat adalah peningkatan kapasitas produksi agregat perekonomian melalui penambahan input dan perbaikan efisiensi. Dalam meningkatkan kapasitas produksi, paling tidak dibutuhkan modal dan tenaga kerja.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Dana Desa merupakan bentuk penambahan modal untuk menunjang perekonomian di desa-desa, dalam pengalokasian dana desa pengelola dituntut untuk dapat memenuhi syarat-syarat tata kelola yang baik (*Good Governance*). Istilah *Good Governance* kembali mengacu pada tahun 1980-an terutama dalam diskusi yang berisi pembangunan. *Governance* merupakan redefinisi dari mendesain dan menemukan kembali konsep administrasi publik.

Ekonomi Islam menilai untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dapat ditemukan

---

<sup>1</sup> Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 69

beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: *syura*, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

Nilai dasar pertama adalah *syura* yang ditegaskan dalam Q.S Ali-Imran (3) : (159) :

.... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

*Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Tujuan dari pengelolaan sektor publik yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>2</sup> Konsep tata kelola yang baik (*Good Governance*) pada awalnya banyak diterapkan di sektor swasta, yang mengacu kepada pengerian sebuah sistem kontrol dan kendali perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, masalah tata kelola berhubungan dengan masalah kontrol dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi, termasuk yang bersifat nirlaba.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan salah satu aspek yang dapat berperan terhadap penurunan tingkat kemiskinan jika diterapkan dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Namun perlu diperhatikan bahwa penerapan *Good*

---

<sup>2</sup> Priyono Tjiptoherijanto dan Mandala Manurung. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 172

*Governance* harus bersih dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu saja. Perlu penerapan *Good Governance* yang optimal dan menyeluruh agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh seseorang dan konteks sosialnya.<sup>3</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu, kredibilitas, kompetensi dan sikap.<sup>4</sup> Untuk mencapai kepercayaan masyarakat maka salah satu cara yang dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintahan tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.<sup>5</sup>

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang beberapa pilar kepercayaan:<sup>6</sup>

1. Partisipasi masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Transparansi

---

<sup>3</sup> Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syarhi Romadhon. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzzaki*, (Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Vol, 2, No3, 2014), h.550

<sup>4</sup> Husein Umar. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. (Jakarta: JBRC, 2000), h.39

<sup>5</sup> Baiq Nurriksianan, dkk. *Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder*. (Jurnal: Akuntansi dan Investasi, Vol 18, No.1, 2017), h. 29

<sup>6</sup> Juanda Nawawi. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. (Jurnal: Ekonomi Akuntansi, 2018), h.23

4. Responstif
5. Kesetaraan dan Keadilan
6. Akuntabilitas

*Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan di pertanggungjawabkan, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam QS Az-Zalzalah (3) :(7-8) :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya :

(7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. *Transparan* di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Kebijakan publik merupakan produksi undang-undang, hukum, dan regulasi yang merupakan salah satu komponen negara agar negara memiliki aturan main bersama supaya kehidupan bersama dapat diatur dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, dimana hal ini sudah menjadi tugas negara.<sup>7</sup> Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat suatu negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD *kabupaten/kota* dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai

---

<sup>7</sup> Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 37

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, h.7

penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik.<sup>9</sup> Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.<sup>10</sup>

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam dana desa sebagaimana berita dalam penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Seluma. Tak semuanya berjalan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang baik. Dari 182 desa yang ada di Kabupaten seluma, 68 desa diantaranya diduga sedang tersandung permasalahan. Bahkan dari jumlah itu 16 desa berpotensi untuk dilanjutkan ke tahapan pidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seluma dari tahun 2017 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Dana Desa Kabupaten Seluma Th. 2017 s.d 2020**

| No | Nama Daerah | Tahun | Jumlah Dana |
|----|-------------|-------|-------------|
| 1  | Kab. Seluma | 2017  | 139.486.234 |
| 2  | Kab. Seluma | 2018  | 126.493.638 |
| 3  | Kab. Seluma | 2019  | 143.052.107 |

<sup>9</sup> Putu Andi Suar Jaya Putra, dkk. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. (Jurnal: Akuntansi Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)

<sup>10</sup> Sulistyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 16

<sup>11</sup><https://betvnews.com/pengelolaan-dana-desa-di-68-desa-diduga-bermasalah/>, diakses tanggal 29 Oktober 2019



Berdasarkan data dana desa Kabupaten Seluma mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sd 2019, dana diterima tertinggi pada tahun 2019 sebesar 143.052.107 dan terendah tahun 2018 sebesar 126.493.638 dalam kurun waktu tiga tahun.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada salah satu warga di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi kabupaten seluma menyatakan masih adanya keraguan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Talang Kebun yang disebabkan minimnya keterlibatan masyarakat luas dalam program pemanfaatan Dana Desa.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”**

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud dalam penelitan ini dibatasi pada akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
2. Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk perilaku masyarakat dalam hubungan timbal balik yang mempengaruhi

---

<sup>12</sup> Romi Mahendra, Masyarkat Desa Talang Kebun Observasi Awal Peneliti , pada tanggal 28 November 2019

sikap dan respon masyarakat desa di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
2. Apakah ada pengaruh transparan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
3. Apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

2. Untuk mengetahui pengaruh transparan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang konsep akuntabilitas dan transparansi dana desa khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Penulis,

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

###### b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintahan pedesaan dalam rangka memberikan dan

menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan yang akan datang.

c. Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan kepustakaan dan wawasan pengetahuan yang dapat digunakan pada masa yang akan datang.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Uni Septivastuti, skripsi yang berjudul *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dengan hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 % dan didukung pula kondisi riil dilapangan dimana sudah terpasang papan proyek pembangunan, papan prasasti marmer, dan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Desa. Hipotesis kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo. Hasil ini didukung dari rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan mayoritas responden setuju dengan frekuensi 45,2 % dan didukung pula

kondisi riil dilapangan dimana pemerintah desa sudah menerapkan partisipasi masyarakat dengan terdapatnya website, media sosial, dan blog desa, serta terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Hipotesis ketiga akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dari rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan hasil 55,6 % menjawab setuju dan hal ini juga didukung kondisi riil di lapangan dimana pemerintah desa sudah melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hipotesis keempat memperoleh hasil bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Ponorogo.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Uni Septiviasuti dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Uni Septiviasuti dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah pada variabel pengelolaan dana desa, metode penelitian dan objek tempat penelitian.

2. Yohanes, dkk. Jurnal yang berjudul *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa*.

---

<sup>13</sup> Uni Septiviasuti, *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)

Hasil penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo sebesar 89,8%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabel tingkat kepercayaan masyarakat desa dan objek kajian penelitian.

3. Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani. Jurnal yang berjudul *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan

---

<sup>14</sup> Yohanes, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa*. (Jurnal: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 7m No 1, 2018)

tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2 %.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabel pengelolaan keuangan desa dan objek lokasi penelitian.

4. Muallifu, dkk. Jurnal yang berjudul *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada a) akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, b) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet

---

<sup>15</sup> Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. (Jurnal: Bisnis, Pasar Modal, UMKM, Vol 2, No1, 2009)

Kabupaten Purbalingga. Artinya semakin banyak perangkat desa yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa, c) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya sistem pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat sehingga menciptakan akuntabilitas yang baik dalam mengelola alokasi dana desa dan d) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya para aparatur pemerintah yang serius menunjukkan komitmen organisasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi sehingga dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mualifu, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mualifu, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabel kompetensi,

---

<sup>16</sup> Mualifu, dkk. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*, (Jurnal: Vol 1, No 1, 2019)



sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, metode penelitian dan lokasi penelitian.

5. Triyono, dkk. Jurnal yang berjudul, *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Studi in The Villages in Wonogiri District)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Aksesibilitas laporan keuangan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Kualitas Pengawasan BPD tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Kapasitas aparat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 5) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 6) Sistem Kontrol Intern Pemerintah (SPIP) berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Triyono, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Triyono, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada metode penelitian dan objek penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>17</sup> Triyono, dkk. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Studi in The Villages in Wonogiri District)*, (Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol 4, No 2, 2019)

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada yang khusus. Pokok masalah memberikan pernyataan tentang sesuatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidak sesuaian antara teori dan praktek. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan secara formal atau pernyataan yang diharapkan akan ditemukan jawaban melalui penelitian yang dilakukan dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk melihat lebih permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Sistematika penulisan skripsi memaparkan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat.

Bab II berisi kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi, kemudian dikemukakan kerangka berpikir yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian dan kemudian dikemukakan hipotesis yang memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan, mencegah peneliti melakukan penelitian coba-coba, membantu peneliti untuk menghindari berbagai variabel pengganggu dan menjadi dugaan awal hasil penelitian.

Bab III berisi metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi gambaran pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab hipotesis awal dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

Daftar Pustaka Daftar Pustaka merupakan suatu susunan tulisan diakhir sebuah karya ilmiah yang berisinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit,dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kepercayaan Masyarakat

###### a. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang.<sup>18</sup>

Beberapa literatur telah mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai berikut kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya sebagaimana yang diutarakan Barnes.

Menurut Peppers dan Rogers, kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan

---

<sup>18</sup> Feby Ramayuniarti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah Pengguna Cash Deposit Machine (CDM) (Studi BNI Syariah Cabang Bengkulu)*, (Skripsi : IAIN Bengkulu, 2017), h. 27

kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Kepercayaan merupakan hal penting bagi kesuksesan relationship.<sup>19</sup>

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

b. Indikator Kepercayaan Masyarakat

Terdapat empat elemen yang diperlukan untuk kepercayaan seseorang terhadap organisasi, seperti dijelaskan berikut ini:<sup>20</sup>

1) *Exhibiting Trust*

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.

2) *Achieving Results*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah

---

<sup>19</sup>Robert M. Morgan dan Shelby D. Hunt, *The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing*, *Journal of Marketing*, Vol. 58, No. 3, 1994, h. 20-23

<sup>20</sup> Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syahrri Romdhon. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)*. (Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Volume 2, No.3, 2014), h. 553

melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

### 3) *Acting With Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi, yang harus dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:

- (1) Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui
- (2) Perkataan harus sesuai dengan perilaku
- (3) Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi
- (4) Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu

Prinsip-prinsip berikut ini sangat diperlukan untuk membantu perkembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu organisasi, yaitu:

- (1) Menetapkan strategi dengan jelas
- (2) Mempunyai agenda yang terbuka
- (3) Mengakui adanya permasalahan
- (4) Memperjelas dan melanjutkan komitmen

#### 4) *Demonstrating Concern*

Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu organisasi tersebut mau mendengar dan menanggapi kepentingannya.

#### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang beberapa pilar sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan:<sup>21</sup>

##### 1) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel.

---

<sup>21</sup> Juanda Nawawi. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. (Jurnal: Ekonomi Akuntansi, 2018), h.23



## 2) Penegakan Hukum

Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif.

## 3) Transparansi

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai output. Maksudnya di sini adalah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya.

## 4) Responsif

Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-nya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan

asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik yakni etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedang etik sosial menuntut mereka agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

#### 5) Kesetaraan dan Keadilan

Tidak ada seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang melahirkan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat. Kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkorelasi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur *Governance*.

#### 6) Akuntabilitas

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya.

Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kepercayaan.

## 2. Konsep Akuntabilitas

### a. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban.<sup>22</sup> Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya.<sup>23</sup>

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pincipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.<sup>24</sup>

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala

---

<sup>22</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 25.

<sup>23</sup> Mohamad Alfi. *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)*, (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2017), h.17

<sup>24</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.20

aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).<sup>25</sup>

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:<sup>26</sup>

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan

---

<sup>25</sup> Muhammad Firdiansyah Adiwirya. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. (Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 11.2., 2015), h. 9

<sup>26</sup> Mardiasmo. *Akuntansi ...*,h.20

(*diskresi*) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).<sup>27</sup>

### c. Dimensi Akuntabilitas

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

#### 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

---

<sup>27</sup> Muhammad Firdiansyah Adiwirya. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*, h.9

<sup>28</sup> Mardiasmo. *Akuntansi ...*, h.21

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *markup* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

d. Indikator Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah:<sup>30</sup>

- 1) Penerapan akuntansi publik

---

<sup>29</sup> Loina Lalolo Krina P. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. (Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), h. 76

<sup>30</sup> Anik Irawati dan Caesar Agesta. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja*. (Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol 10, No1, 2019), h. 57

- 2) Kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri
- 3) Kualitas laporan keuangan
- 4) Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
- 5) Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan
- 6) Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Fajri Fadhilah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Lahat*. (Skripsi: Politeknik Sriwijaya Palembang, 2019), h. 18



### 3. Konsep Transparansi

#### a. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas).<sup>32</sup> Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.<sup>33</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...h. 1209.

<sup>33</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 39

pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.<sup>34</sup>

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.<sup>35</sup>

Menurut Zeithaml dan Berry dalam melaksanakan kualitas pelayanan. di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

---

<sup>34</sup>Erwin Agus P dan Dyah Ratih S, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Gava Media, 2010), h.21

<sup>35</sup> Mohamad Alfi. *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)*, h.22

dijabarkan dalam Kep. Menpan RI No.KEP/26/ M. PAN/2/2004. Maksud ditetapkan Keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.<sup>36</sup>

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance.*” Jurnal Otonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan

---

<sup>36</sup> Ahmad Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2019

bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.<sup>37</sup>

b. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator transparansi yaitu:<sup>38</sup>

a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
- 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
- 3) Adanya basis legal untuk pajak.
- 4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
- 5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.

b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

- 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).

---

<sup>37</sup> Ahmad Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2019.

blogspot. co. id/ 2011/ 03/ transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html, diakses pada tanggal 12 November 2019

<sup>38</sup> Nico Andrianto. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, h.21

- 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
  - 3) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang (BPK RI)
  - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
  - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- c) Adanya audit yang independen dan efektif.
- 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
  - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
  - 3) Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- 1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
  - 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.
- c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Kebijakan
- 2) Regulasi

---

<sup>39</sup> I Putu Andi Suarjaya Putra, dkk. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. (Jurnal: Vol 8, No 2, 2017), h. 3

- 3) Program
  - 4) Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik
4. Konsep Dana Desa
- a. Pengertian Dana Desa

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan:<sup>40</sup>

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat;
- 2) Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- 3) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali;

---

<sup>40</sup> Arif Widyatama, dkk. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, (Jurnal: BAKI, Volume 2, Nomor 2, 2017), h. 8

- 4) Jenis kegiatan yang akan di danai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah;
- 5) Alokasi Dana Desa harus di catat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan

pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.<sup>41</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan:<sup>43</sup>

- 1) Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
- 2) Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Miftahuddin. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2018), h. 11

<sup>42</sup> Miftahuddin. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, h.12

<sup>43</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses tanggal 12 November 2019



- 3) Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4:<sup>44</sup>

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 2) Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
- 4) Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
- 5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

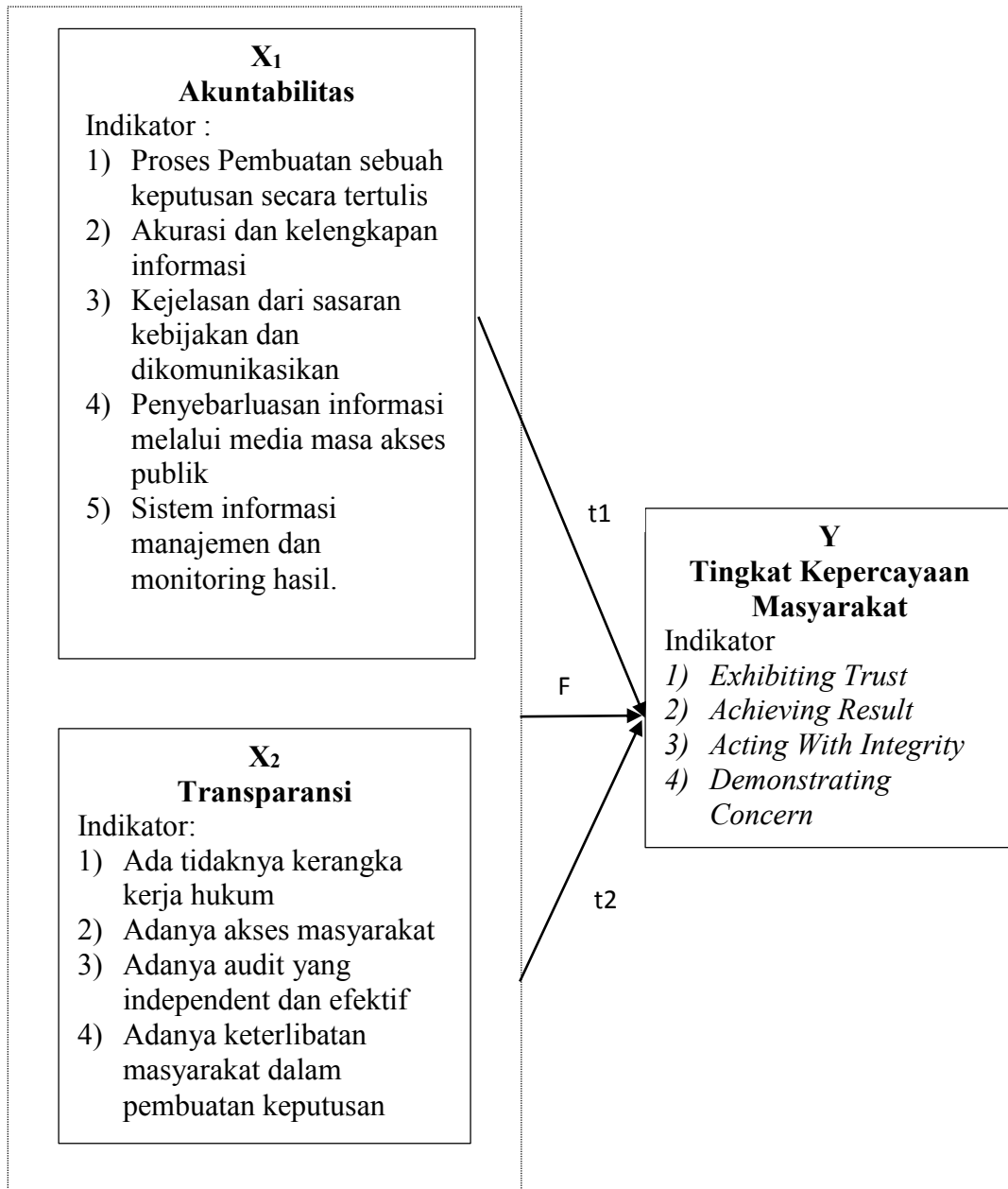
## **B. Kerangka Berpikir**

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

---

<sup>44</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/uu\\_2014](https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/uu_2014)

pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



**Gambar 2.1**  
**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma**

### C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji ialah:

- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian *survey research*, *survey research* adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>45</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *survey research*. Menurut Karlinger merupakan penelitian pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, yaitu penelitian yang bersifat menganalisis dan membuktikan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dari pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Dengan

---

<sup>45</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 4

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.<sup>46</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### 1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan oleh penulis dari tanggal 30 Januari 2020 s.d Juni 2020

### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

## **C. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>47</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh Warga Desa Talang Kebun yang berjumlah 182 KK.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah jenis sampel *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap

---

<sup>46</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian...*, h.7.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 117.

unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik penentuan sampel ini dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memiliki pertimbangan tertentu.<sup>48</sup> Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SLTA sebanyak 62 KK.

#### **D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data Penelitian**

###### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan angket tertutup yang ditujukan kepada responden Warga Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

###### **b. Data Skunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, catatan atau informasi dari pihak lain sehubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h.43

## E. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel dan Definisi Operasional :

### 1. Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>49</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2).

### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen).<sup>50</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu kepercayaan masyarakat (Y).

## F. Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan teknik sebagai kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan kepada pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner tersebut yang merupakan pertanyaan positif yang memiliki nilai 1 sampai 5

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*, h.61

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*, h.61

Hasil jawaban responden terhadap kuesioner skor jawaban, dimana skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu terhadap variabel penelitian. Adapun ketentuannya adalah :<sup>51</sup>

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Skala Kategori Responden**

| <b>Kategori</b>     | <b>Nilai</b> |
|---------------------|--------------|
| Sangat setuju       | 5            |
| Setuju              | 4            |
| Netral              | 3            |
| Tidak setuju        | 2            |
| Sangat Tidak setuju | 1            |

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Pengujian Kualitas Data**

Sebelum melakukan analisis data dengan kuantitatif korelasi menggunakan teknik analisis uji regresi sederhana, maka harus dilakukan beberapa uji persyarat yakni :

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.<sup>52</sup> Pengukuran validitas angket dilakukan dengan menggunakan *correlation person* yaitu mengkorelasikan skor item masing-masing nomor dengan total skor

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.93

<sup>52</sup> Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. (Semarang: BPUD, 2011), h.52



item, peneliti hanya akan menggunakan soal-soal yang terbukti valid dari hasil analisis instrumen. Hasil analisis perhitungan validitas butir soal ( $\text{sig}$ ) dikonsultasikan dengan  $\alpha$  (0.05) , dengan taraf signifikan 5 %. Bila harga  $\text{sig} > \alpha$  maka butir soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila harga  $\text{sig} > \alpha$  maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid.

Perhitungan validitas item angket dilakukan dengan penafsiran koefisien korelasi, yakni  $r_{xy\text{hitung}}$  dibandingkan dengan  $r_{xy\text{tabel}}$ . Adapun nilai  $r_{xy\text{tabel}}$  untuk validitas item angket adalah 0,5. Artinya, apabila  $\text{sig}$  lebih besar atau sama dengan 0,5 ( $r_{xy} \geq 0,5$ ), maka item angket tersebut dapat dikatakan valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, peneliti melanjutkan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas angket, digunakan perhitungan dengan teknik Alpha Cronbach's. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Ada dua alasan peneliti menggunakan uji Cronbach's Alpha. Pertama, karena teknik ini merupakan teknik pengujian keandalan kuesioner yang paling sering

---

<sup>53</sup>Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate ...*, h.47

digunakan. Kedua, dengan melakukan uji Cronbach's Alpha maka akan terdeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten.

Perhitungan angket dilakukan dengan cara mengkonsultasikan koefisien reliabilitas hitung nilai kritik atau standar reliabilitas. Adapun nilai kritik untuk reliabilitas angket adalah 0,5. Artinya, apabila nilai kritik untuk reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,5 ( $r_i \geq 0,5$ ), maka angket tersebut dikatakan reliabil.<sup>54</sup>

## 2. Uji Asumsi Dasar

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebaran skor variabel apabila terjadi penyimpangan tersebut. Dalam penelitian untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan rumus Kolmogrov-Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>55</sup>

a) Jika Signifikansi (*Significance level*)  $> 0.05$  maka Distribusi normal

b) Jika signifikansi (*Significance level*)  $< 0.05$  maka Distribusi tidak normal

### b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk menguji bahwa setiap kelompok yang akan dibandingkan memiliki variansi yang

---

<sup>54</sup> Joseph F Hair. *Multivariate Data Analisis*. Et All. (New York: Prantice Hall International, 1998), h. 125

<sup>55</sup> Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate ...*, h.160

sama.<sup>56</sup> Untuk mengetahui apakah kedua variansi tersebut homogen, maka dilakukan uji  $F$  (*Fisher*) dengan rumus:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{Varian Terbesar}}{\text{Varian Terkecil}}$$

Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $F_{\text{hitung}}$  dengan  $F_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan  $dk_{\text{pembilang}} = n_a - 1$  dan  $dk_{\text{penyebut}} = n_b - 1$ . Apabila  $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka kedua kelompok data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Dalam pengelolaan data selanjutnya akan digunakan alat bantu program SPSS IBM Versi 25.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikonolinearitas

Uji Multikonolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi yang digunakan. Semakin kecil korelasi diantara variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh. metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikonolinearitas yaitu dengan menggunakan *Tolerance* dan *Varianceinflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikonolinearitas.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Ali Gunawan. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial*. (Yogyakarta: Peramana Publishing, 2015), h. 78

<sup>57</sup>Duwi Priyanto, *Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h.60

#### 4. Pengujian Hipotesis

Suatu hipotesis biasanya merupakan hasil dari dugaan berdasarkan pengamatan rutinitas dan gejala alam ataupun berdasarkan teori. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya.<sup>58</sup> Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan.

Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain akan diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu jika  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima atau sebaliknya. Uji hipotesis analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi.

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas (X1), transparansi (X2), terhadap kepercayaan masyarakat (Y).

---

<sup>58</sup> Muhammad farhan Qudratullah, *Satistika Terapan: Teori, contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 198

<sup>59</sup> Jonathan Sarwono, *Statistik itu Mudah, Panduan Lengkap Mengajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. (Yogyakarta: Andi, 2009), h.91

a. Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis statistika yang bertujuan mencari model linier antara variabel bebas (independen) atau regresor terhadap variabel respons atau dependen.<sup>60</sup>

Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Dengan :

Y = variabel dependen

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi masing-masing variabel

X1 = variabel independen

X2 = variabel independen

E = variabel pengganggu

b. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.<sup>61</sup> Selain itu dapat juga dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima

---

<sup>60</sup> Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 53

<sup>61</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h.229

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.<sup>62</sup>

c. Uji F

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (fit) atau tidak. Uji F ini sering disebut sebagai uji simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan df: (k-1), (n-k).<sup>63</sup>

5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya.<sup>64</sup>

Koefisien determinasi dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : kontribusi variabel x terhadap variabel y

$r^2$  : koefisien korelasi antara variabel x terhadap variabel y

---

<sup>62</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate ...*, h.99

<sup>63</sup> Sulyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi ...*, h. 44

<sup>64</sup> Sulyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi ...*, h. 40

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Talang Kebun adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Sebelumnya masyarakat Desa Talang Kebun berasal dari penduduk Desa Tanjung Kuaw, yang mana pada masa itu mereka membuat kebun di Lubuk Betung.

Pada tahun 1937-1940, sebelum Indonesia Merdeka kehidupan mereka sering berpindah-pindah sehingga lahan yang digarap sebelumnya mereka tinggalkan untuk mencari lahan yang subur. Setelah menemukan lahan yang subur mereka menetap dan membuat talang.

Semakin berjalannya waktu talang yang dibuat semakin ramai, sehingga terbentuknya dusun yang disebut Talang Kebun yang berasal dari kata “Talang dan Kebun”.

Dusun Talang Kebun mulai berdiri pada tahun 1950 yang dipimpin oleh seorang penggawa (Kadus), yang berpusat di desa pemerintahan Tumbu'an dengan Depati Ramli. Pada zaman pemerintahan dilakukan pembangunan masjid pertama Desa Talang Kebun yang bernama Masjid Nurul Iman.

Pada tahun 1970 pemerintahan dusun diteruskan dengan Abu Hasan dilakukan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dibentuk juga PKK dan diusulkannya Dusun menjadi Desa.

Akhir tahun 1978 terbentuknya Desa Talang Kebun dipimpin depati pada tahun 1986, Desa Talang Kebun Baru melakukan pemilihan secara demokrasi secara langsung yang diikuti 3 calon yaitu Yusuf, Zainul, dan Baitu Timbul, dengan kepala Desa terpilih Baitu Timbul.

Pada masa kepemimpinan Baitu Timbul dari tahun 1986-1991, masuknya Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Kelapa Sawit, disertai pembuatan badan jalan, pembuatan balai Desa, pembuatan pos kamling dan pembuatan sumur umum.

Pada tahun 1991 dilakukan pemilihan kepala desa kedua dengan kepala desa terpilih Badri Mahmud. Pada masa pemerintahan Badri Mahmud dilakukan pengusulan Trans, Rehab dan pemindahan Masjid serta pengusulan perbaikan jalan desa.

Pada tahun 1993 dilakukan pemilihan ke tiga, dengan kepala desa terpilih Marwan. Pada masa Pemerintahan Marwan mulai dilakukan pelaksanaan perbaikan jalan, pembagian lahan PIR sawit kepada masyarakat, masuknya transmigrasi, dibangunnya masjid trans, dibangunnya SD Impres, masuknya AMD, pembuatan balai desa, pembangunan gudang PKK, rumah dinas KUPT, dan masuknya mahasiswa KKN UNIB.

Pemilihan Kepala Desa ke empat dilakukan pada tahun 2002 dengan kepala desa Marwan. Pada tahun 2004 Marwan mengundurkan diri dari kepala desa dan di PJS kan kepada Sandri, dengan alasan mengundurkan diri untuk menjadi calon DPRD. Setelah berlangsung



selama 1 tahun jabatan PJS diteruskan kembali Marwan sebagai kepala desa Talang Kebun, pada masa keduanya adanya bantuan beras (raskin), pembuatan PUSTV, pembuatan batas Desa, masuknya IDT, Program P2KP, Program PNPM-MP, pengusulan rehap gedung Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS), dan pembentukan kelompok tani, adanya PT.Laras Prima Sakti bergerak dibidang perkebunan, dan rencana sekolah kepolisian.

Setelah masa jabatan Marwn Habi, masyarakat Talang Kebun tidak mau mencalonkan Kepala Desa maka Marwan kembali diangkat menjadi PJS Kades, masuknya bantuan PNPM-MP dengan kegiatan pemasangan bronjong dan pembuatan jalan rabat beton serta polindes. Tahun 2009 Marwan mengundurkan diri dari PJS dengan alasan kembali mencalonkan diri menjadi DPR propinsi dan pihak kecamatan menempatkan Afwardi Yeki Musrifa Pegawai Negri Sipil Menjadi PJS Kades Talang Kebun selama Enam Bulan. Pada masa Afwardi Yeki Musrifa sekdes diangkat menjadi PNS, bantuan motor dinas, dimulainya kegiatan bantuan PNPM-MP pemasangan bronjong dan pembuatan jalan rabat beton. Setelah itu Marwan kembali PJS kades selama enam bulan dan mendapatkan bantuan telpon umum dan bantuan untuk PKK.

Pada awal tahun 2010 masyarakat Talang Kebun Kembali mengadakan pemilihan kepala desa ke 5 dengan terpilih kepala desa terpilih Junaidi. Pada masa pemerintahan Junaidi, masuknya jaringan PDAM, bantuan langsung dari Bupati barang PKK, dibangunnya

pembangunan gedung polindes bantuan PNPM-MP, bantuan kelompok tani berupa bibit karet, menerima Bantuan untuk desa berupa dana ADD dan DD untuk pembangunan Desa dan ketentraman masyarakat desa, mendapatkan bantuan mobil dinas. Setelah jabatan Junaidi habis PJS desa Talang Kebun diadakan kembali dari kantor camat diangkat M Hosen.

## 2. Demografi

Desa Talang Kebun terletak di dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Terentang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hutan Lindung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Kuaw
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lagan

Luas wilayah Desa Talang Kebun adalah 7.200 Ha dimana 45 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 55 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet dan Perkebunan Kopi.

Iklm Desa Talang Kebun, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam tanaman padi dan panen buah sawit, kopi serta getah karet pada lahan pertanian yang ada di Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi.

## 3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Talang Kebun mayoritas pribumi dan hanya ada beberapa orang pendatang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Talang Kebun dan hal tersebut secara efektif dapat meningkatkan kerjama sesama masyarakat dan dapat menghindari adanya benturan-benturan yang dapat terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

Desa Talang Kebun mempunyai jumlah penduduk 604 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 306 jiwa, perempuan 298 orang dan 182 KK. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talang Kebun sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan**

| <b>Pra Sekolah</b> | <b>SD</b>   | <b>SLTP</b> | <b>SLTA</b> | <b>Sarjana</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 97<br>orang        | 59<br>Orang | 91<br>Orang | 62<br>orang | 7<br>orang     |

Karena Desa Talang Kebun merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Pekerjaan**

| <b>Petani</b> | <b>Pedagang</b> | <b>PNS</b> | <b>Buruh</b> |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 329<br>Orang  | 14<br>Orang     | 6<br>Orang | 19<br>Orang  |

Penggunaan tanah di Desa Talang Kebun sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan

sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### 4. Sarana Dan Prasarana Desa

**Tabel 4.3**  
**Sarana & Prasarana**

| NO | SARANA/PRASARANA      | JUMLAH/<br>VOLUME | KETERANGAN |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1  | Balai Desa            | 1 Unit            |            |
| 2  | Kantor Desa           | 1 Unit            |            |
| 3  | Puskesmas Pembantu    | 1 Unit            |            |
| 4  | Masjid                | 1 Unit            |            |
| 5  | Mushola               | 1 Unit            |            |
| 6  | Pos Kamling           | 1Unit             |            |
| 7  | PLTD                  | 1 Unit            |            |
| 8  | Gudang Perkumpulan    | 1 Unit            |            |
| 9  | SD Negeri             | 1 Unit            |            |
| 10 | Jembatan Gantung      | 3 Unit            |            |
| 11 | Jembatan Gelagar Kayu | 2 Unit            |            |
| 12 | SPAL                  | 1 Unit            |            |
| 13 | Tempat Pemakaman Umum | 3 Lokasi          |            |
| 14 | Sungai                | 6.000 m           |            |
| 15 | Jalan Tanah           | 2.000 m           |            |
| 16 | Jalan Rabat Beton     | 1.800 m           |            |
| 17 | Jalan aspal Penetrasi | 1.500 m           |            |

#### 5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Talang Kebun secara garis besar tidak terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencarian di sektor perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, guru, serta buruh harian, dll.

## 6. Kondisi Pemerintah Desa

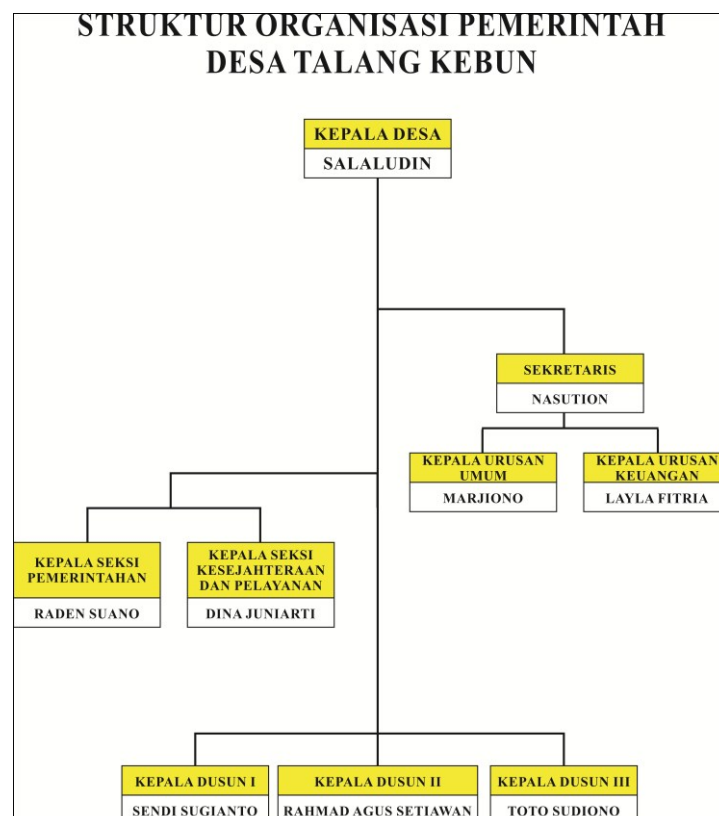
### a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Talang Kebun dibagi menjadi 2 (dua) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

### b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



## B. Hasil Penelitian

### 1. Data Deskriptif Responden

Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk menguatkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan angket (kuesioner) kepada sampel sebanyak 62 responden. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
|    | Laki-Laki     | 62     | 100 %      |
|    | Jumlah        | 62     | 100 %      |

Sumber: Data Primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 62 kepala keluarga yang menjadi responden di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma terdiri dari 100 % laki-laki.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Umur**

| No | Umur         | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|--------|------------|
| 1  | <19-29 Tahun | 16     | 25.8       |
| 2  | 30-40 Tahun  | 29     | 46.8       |
| 3  | 40-50> Tahun | 17     | 27.4       |
|    | Jumlah       | 62     | 100 %      |

Sumber: Data Primer yang diolah 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa sampel penelitian di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma menjadi responden paling banyak adalah berumur 30 sd 40 tahun sebesar 46,8 %,

kemudian diikuti oleh responden berumur 40 sd 50 > tahun sebesar 27,4 %, dan umur  $\leq$  19 sd 29 tahun sebesar 25,8 %.

## 2. Pengujian Kualitas Data

### a. Pengujian Validitas

Uji validitas ini digunakan sebelum kuisioner disebarakan kepada objek penelitian untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah instrument penelitian. Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan Pearson Corelation, dimana dikatakan valid jika nilai Konsistensi alat ukur yang digunakan dalam uji validitas memiliki kriteria apabila suatu indikator dinyatakan valid dengan syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Variabel Penelitian**

| No | Variabel    | Item Angket | $r_{hitung}$ | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 1  | Variabel X1 | 1           | 0,631        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 2           | 0,560        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 3           | 0,844        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 4           | 0,552        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 5           | 0,618        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 6           | 0,623        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 7           | 0,703        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 8           | 0,632        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 9           | 0,822        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 10          | 0,571        | 0.250       | Valid      |
| 2  | Variabel X2 | 1           | 0,756        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 2           | 0,737        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 3           | 0,783        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 4           | 0,565        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 5           | 0,655        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 6           | 0,752        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 7           | 0,691        | 0.250       | Valid      |
|    |             | 8           | 0,727        | 0.250       | Valid      |

|   |               |    |       |       |       |
|---|---------------|----|-------|-------|-------|
| 3 | Variabel<br>Y | 1  | 0,562 | 0.250 | Valid |
|   |               | 2  | 0,579 | 0.250 | Valid |
|   |               | 3  | 0,659 | 0.250 | Valid |
|   |               | 4  | 0,780 | 0.250 | Valid |
|   |               | 5  | 0,652 | 0.250 | Valid |
|   |               | 6  | 0,630 | 0.250 | Valid |
|   |               | 7  | 0,782 | 0.250 | Valid |
|   |               | 8  | 0,711 | 0.250 | Valid |
|   |               | 9  | 0,653 | 0.250 | Valid |
|   |               | 10 | 0,637 | 0.250 | Valid |
|   |               | 11 | 0,654 | 0.250 | Valid |
|   |               | 12 | 0,627 | 0.250 | Valid |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Konsistensi alat ukur yang digunakan dalam uji validitas memiliki kriteria apabila suatu indikator dinyatakan valid dengan syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .<sup>65</sup> Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh item memiliki nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , maka alat ukur dapat dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian ke realibilitas.

#### b. Pengujian Realibilitas

Uji reliabilitas data digunakan penyebaran kepada responden sudah dapat dipercaya. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan konsisten atau stabil. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Alpha Cronbach's.

Konstanta alat ukur yang digunakan dalam uji realibilitas ini memiliki kriteria apabila suatu indikator dinyatakan realibel dengan

---

<sup>65</sup> Imam Ghozali. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. (Semarang: BPUD, 2011), h. 53



syarat Cronbach's Alpha lebih besar 0.70, maka dinyatakan realibel, sedangkan jika Cronbach's Alpha lebih kecil 0.70, maka dinyatakan tidak realibel.<sup>66</sup>

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Realibilitas**

| No | Keterangan | <i>Cronbach's Alpha</i> | Keterangan   |
|----|------------|-------------------------|--------------|
| 1  | X1         | 0,851                   | Sangat Andal |
| 2  | X2         | 0,858                   | Sangat Andal |
| 3  | Y3         | 0,881                   | Sangat Andal |

Sumber: Data Primer yang diolah 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk ke 3 variabel penelitian yang diteliti memiliki nilai koefisien *Cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur variabel akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat.

### 3. Uji Asumsi Dasar

#### 1. Pengujian Normalitas

Normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan *Skewnes* dengan kriteria jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaiknya Jika nilai

---

<sup>66</sup> Imam Ghozali. *Aplikasi Multivariate dengan...*, h. 48

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.<sup>67</sup>

Pengujian normalitas yang digunakan adalah teknik *Kolmogorov Smirnov*, untuk menentukan normalitas digunakan pedoman sebagai berikut:

Signifikan uji ( $\alpha$ ) = 0.05

Jika  $\text{sig} > \alpha$  maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika  $\text{sig} < \alpha$  maka sampel tidak berasal dari populasi yang tidak normal.<sup>68</sup>

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test     |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
|  |                | Unstandardized Residual |
| N                                      |                | 62                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>       | Mean           | .0000000                |
|  | Std. Deviation | 7.42498511              |
| Most Extreme Differences               | Absolute       | .107                    |
|  | Positive       | .071                    |
|  | Negative       | -.107                   |
| Test Statistic                         |                | .107                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                 |                | <b>.072<sup>c</sup></b> |
| a. Test distribution is Normal.        |                |                         |
| b. Calculated from data.               |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction. |                |                         |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,072 > dari nilai alpha 0.05. maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal dan

<sup>67</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonom...*, h. 25

<sup>68</sup> Sulyanto. *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 75

layak dilanjutkan untuk dilakukan pengujian kualitas data selanjutnya.

## 2. Hasil Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara variabel X terhadap variabel Y secara berpasangan menguji signifikan homogenitas dengan cara adalah:

Jika nilai signifikan *Based on Mean*  $> 0.05$ , maka varians homogen, jika nilai signifikansi  $< 0.05$ , maka varians tidak homogen.<sup>69</sup>

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Homogenitas Varians**

| Test of Homogeneity of Variances |                                      |                  |     |        |      |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|--------|------|
|                                  |                                      | Levene Statistic | df1 | df2    | Sig. |
| Akuntabilitas                    | Based on Mean                        | 2.725            | 15  | 36     | .069 |
|                                  | Based on Median                      | 1.100            | 15  | 36     | .390 |
|                                  | Based on Median and with adjusted df | 1.100            | 15  | 17.092 | .421 |
|                                  | Based on trimmed mean                | 2.606            | 15  | 36     | .009 |
| Transparansi                     | Based on Mean                        | 5.681            | 15  | 36     | .160 |
|                                  | Based on Median                      | 2.116            | 15  | 36     | .033 |
|                                  | Based on Median and with adjusted df | 2.116            | 15  | 11.574 | .102 |
|                                  | Based on trimmed mean                | 5.529            | 15  | 36     | .000 |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi *Based on Mean* variabel penelitian sebesar 0.069 dan 0.160 lebih

<sup>69</sup> Muhammad Ali Gunawan. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan Psikologi dan Sosial*. (Yogyakarta: Parama, 2015), h. 85

besar dari nilai *alpha* sebesar 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel bersifat homogen yang artinya layak untuk dilanjutkan ke pengujian Asumsi Klasik.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji multikolinearitas yaitu dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variabel | Tolerance | VIF   | Keterangan              |
|----------|-----------|-------|-------------------------|
| X1       | 0.609     | 1.641 | Bebas Multikolinearitas |
| X2       | 0,609     | 1.641 | Bebas Multikolinearitas |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance*  $X_1$  dan  $X_2$  sebesar 0.609 lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF  $X_1$  dan  $X_2$  sebesar 1.641 lebih kecil dari 10 artinya model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Jadi berdasarkan hasil uji multikolinearitas penelitian selanjutnya bisa menggunakan statistik statistik parametris dalam uji hipotesisnya menggunakan uji regresi berganda.

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Hasil Uji Regresi Berganda

Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti ingin meneliti pengaruh dari dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Berikut disajikan hasil dari analisis regresi linear berganda

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |               |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |               | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)    | <b>32.228</b>               | 5.079      |                           | 6.345  | .000 |
|                           | Akuntabilitas | .727                        | .154       | .670                      | 4.731  | .000 |
|                           | Transparansi  | <b>-.718</b>                | .204       | -.498                     | -3.521 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear seperti berikut ini:

$$Y = 32,228 + 0,727X_1 + (-0,718)X_2 + e_i$$

Dari persamaan regresi linear di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta atau  $\beta_0$  dari persamaan regresi linear adalah sebesar 32,228 yang berarti tanpa adanya akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ), maka kepercayaan masyarakat ( $Y$ ) sebesar 32,228. Hal ini dikarenakan masih adanya variabel lain diluar variabel akuntabilitas dan transparansi yang mempengaruhi

kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,727 yang berarti jika variabel akuntabilitas meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap kepercayaan masyarakat sebesar 0,727 dan variabel lain dianggap tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel variabel akuntabilitas ( $X_2$ ) adalah sebesar -0,718 yang berarti jika variabel transparansi menurun maka akan menyebabkan penurunan terhadap kepercayaan masyarakat sebesar -0,718 dan variabel lain dianggap tetap.

**b. Uji-t**

Teknik uji t ini digunakan untuk menguji untuk apakah semua variabel bebas yang ada pada model secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan pada model secara individual.

Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan ( $\text{sig}$ ) < alpha 0,05 maka terdapat pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan ( $\text{sig}$ ) > alpha 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Berikut disajikan hasil penelitian uji t.

**Tabel 4.12**  
**Hasil uji t**

| Coefficients <sup>a</sup> |               |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |               | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)    | 32.228                      | 5.079      |                           | 6.345  | .000 |
|                           | Akuntabilitas | .727                        | .154       | .670                      | 4.731  | .000 |
|                           | Transparansi  | -.718                       | .204       | -.498                     | -3.521 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- 1) Nilai (sig) untuk variabel variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
- 2) Nilai (sig) dari variabel transparansi ( $X_2$ ) sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

### c. Hasil Uji –F

Pengujian penelitian ini menggunakan teknik uji F dengan metode uji Anova yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan

koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat,<sup>70</sup>

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat ( $Y$ ). Keputusan dari uji F ini bisa didapatkan dengan membandingkan antara nilai sig dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5 % atau 0,05. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Berikut disajikan hasil dari penelitian uji F.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup>                                     |            |                |    |             |        |                   |
|--|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model  |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1  | Regression | 1305.384       | 2  | 652.692     | 11.451 | .000 <sup>b</sup> |
|  | Residual   | 3362.955       | 59 | 56.999      |        |                   |
|  | Total      | 4668.339       | 61 |             |        |                   |
| a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat          |            |                |    |             |        |                   |
| b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas |            |                |    |             |        |                   |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) transparansi ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat ( $Y$ ).

<sup>70</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 259



#### d. Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R square ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh ke smampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.<sup>71</sup>

Koefisiendeterminasi  $R^2$  digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma .

**Tabel 4.14**  
**R Square**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b>                       |                   |          |                   |                            |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model  | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1  | .529 <sup>a</sup> | .280     | <b>.255</b>       | 7.550                      |
| a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas |                   |          |                   |                            |
| b. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat          |                   |          |                   |                            |

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 2020

Pada tabel diatas, maka diperoleh nilai koefisien determinasi atau r square sebesar 0.255 hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas dan transparansi untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat adalah sebesar 0.255 atau 25,50 % sisanya 74,50 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

<sup>71</sup> Setiawan dan Dwi Endah Kusri, *Ekonomitrika* ,...h. 64

### C. Pembahasan

1. Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil sig sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma . Artinya semakin baik variabel akuntabilitas maka akan semakin tinggi variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Maka kepercayaan masyarakat akan di tunjukkan dengan aktifnya masyarakat dalam mengikuti dan mengawal program dana desa yang telah ditetapkan. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah variabel akuntabilitas maka akan mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat, sehingga mempengaruhi keaktifan masyarakat dalam menjalankan program dana desa di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma,

Hal ini sejalan dengan penelitian Yohanes, dkk., Jurnal yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Hasil penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo sebesar 89,8 %. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa

akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo.

2. Terdapat pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil sig sebesar 0.001 lebih kecil dari alpha 0.05, hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Artinya variabel transparansi pengelolaan dana desa mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Uni Septiviasuti, skripsi yang berjudul Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dengan hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 % dan didukung pula kondisi riil di lapangan dimana sudah terpasang papan proyek pembangunan, papan prasasti marmer, dan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Desa.

Hipotesis kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.<sup>72</sup>

3. Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Hasil perhitungan uji simultan diperoleh hasil sig sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Artinya semakin baik variabel akuntabilitas dan transparansi maka akan semakin tinggi variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma maka kinerja karyawan Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma semakin baik pula, juga sebaliknya semakin rendah variabel variabel akuntabilitas dan transparansi maka akan mempengaruhi semakin buruk kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Dalam uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.255 atau 25,50 % yang berarti bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki kontribusi dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi

---

<sup>72</sup> Uni Septivastuti, *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)

Kabupaten Seluma sebesar 25,50 % dan sisa sebesar 74,50 dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Menurut Syahdan, dkk., menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), karena Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengarkan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasi kepada wakil-wakilnya.
- b. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
- d. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

---

<sup>73</sup> Putu Andi Suarjaya Putra, dkk. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. (Jurnal: Akuntansi, Vol 1, No.2, 2017)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma melalui uji t, dengan kriteria membandingkan nilai sig dengan nilai sig hitung. adapun nilai diperoleh yaitu  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis  $H_1$  diterima.
2. Variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t dengan nilai sig sebesar 0.001 lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 sehingga  $H_2$  diterima
3. Variabel akuntabilitas dan Variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Hal tersebut dibuktikan melalui uji F (simultan) yang nilai sig kurang dari  $\alpha$  0.05 yaitu sebesar 0.000 sehingga hipotesis  $H_3$  diterima.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk Pemerintah Desa di Desa Talang Kebun sudah melakukan prinsip transparansi dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di papan informasi kantor Desa dan saran peneliti agar disetiap penganggaran pemerintah desa cepat dalam memberikan informasi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Desa.
2. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah penelitian yang lebih mendalam terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa serta, diharapkan dapat meneliti indikator lain dari Akuntabilitas Dan Transparansi karena masih terdapat variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dan Syukriy Abdullah. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi pemerintah. Vol 2, 2006
- Arif Widyatama, dkk. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Jurnal: BAKI, Volume 2, Nomor 2, 2017
- Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syarhi Romadhon. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap kepercayaan Muzzaki*, Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Vol, 2, No3, 2014
- Baiq Nurritzianan, dkk. *Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder*. Jurnal: Akuntansi dan Investasi, Vol 18, No.1, 2017
- Boedino. *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE, 2001
- Dwi Priyanto, *Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate dengan SPSS* Yogyakarta: Gava Media, 2011
- \_\_\_\_\_, *Mandiri Belajar SPSS*, Jakarta: PT. Buku Kita, 2009
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media, 2010
- Feby Ramayuniarti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah Pengguna Cash Deposit Machine (CDM) (Studi BNI Syariah Cabang Bengkulu)*, Skripsi : IAIN Bengkulu, 2017
- Getut Pramesti, *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi Dengan SPSS 23*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016
- Gregory Mankiw. *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2019



- <https://betvnews.com/pengelolaan-dana-desa-di-68-desa-diduga-bermasalah/>
- [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Husein Umar. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: JBRC, 2000
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Universitas Depononegoro, 2011
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Irma Nur Afni. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2017
- Irna Setiyanningrum. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Joko Setyono. *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*. Jurnal: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015
- Jonathan Sarwono, *Statistik itu Mudah, Panduan Lengkap Mengajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Andi, 2009
- Juanda Nawawi. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal: Ekonomi Akuntansi, 2018
- Loina Lalolo Krina P. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN, 2010
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Miftahuddin. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi: UIN Yogyakarta, 2018
- Moh. Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Mohamad Alfi. *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)*, Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2017

- Mualifu, dkk. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*. Jurnal: Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019
- Muhammad farhan Quadratullah, *Satistika Terapan: Teori, contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 11.2., 2015
- Nico Andrianto. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Putu Andi Suar Jaya Putra, dkk. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Jurnal: Akuntansi Vol : 8 No : 2 Tahun 2017
- Riant Nugroho. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Alex Media Competindo, 2014
- Robert M. Morgan dan Shelby D. Hunt, *The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing*, *Journal of Marketing*, Vol. 58, No. 3, 1994
- Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2013
- Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Triyono, dkk. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*, Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Indonesia, Voleume 4, No.2, 2019
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015

## ANGKET

### **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARAN DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA TALANG KEBUN KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Responden yang terhormat,

Perkenalkan nama saya Norni Oktavia mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sedang melaksanakan tugas akhir (Skripsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparan Dana Desa Terhadap kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma**". Dalam rangka pengumpulan data yang menjadi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Ekonomi Islam (S1), saya mohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner dibawah ini berdasarkan jawaban anda yang sejujurnya. Jawaban anda sangat berharga bagi penelitian yang sedang saya lakukan. Atas bantuan dan ketersediaan yang anda berikan, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bengkulu, 16 Maret 2020

Peneliti,

**Norni Oktavia**

NIM. 1611130132

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Andang Sunarto, Ph.D**  
NIP. 197611242006041002

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032000

## PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah jawaban dengan tanda (√) pada setiap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Nama :

Jenis Kelamin :

Perempuan

Laki-Laki

Umur :

<18 tahun

19-29 tahun

>30 tahun

Pertanyaan yang diajukan disediakan 5 pilihan jawaban dengan ketentuan skala sebagai berikut:

1. Sangat Setuju diberi Sekor 5 (SS)
2. Setuju diberi Sekor 4 (S)
3. Netral diberi Sekor 3 (RR)
4. Tidak Setuju diberi Sekor 2 (TS)
5. Sangat Setuju diberi Sekor 1 (STS)

### A. Pertanyaan

#### 1. Akuntabilitas

| NO  | PERTANYAAN  | SS | S | N | TS | STS |
|---|---|----|---|---|----|-----|
| <b>Pembuatan Keputusan di tulis Secara Tertulis</b> |   |    |   |   |    |     |
| 1   | Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat                           |    |   |   |    |     |
| 2   | Anggaran disajikan secara terbuka dan tertulis yang mudah dipahami masyarakat |    |   |   |    |     |
| <b>Akurasi dan Kelengkapan Informasi</b>            |   |    |   |   |    |     |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 3   | Angaran dana desa disajikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat   |  |  |  |  |  |
| 4   | Inforamsi dana desa dilaporkan dengan bukti-bukti yang dapat dipahami oleh masyarakat luas                           |  |  |  |  |  |
| <b>Kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan</b>         |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Proses dan pertanggungjawaban dana desa dilaporkan secara priodik dan terus-menerus                                  |  |  |  |  |  |
| 6   | Penyajian dana desa telah menyertakan informasi masa lalu  |  |  |  |  |  |
| <b>Penyebarluasan Informasi Melalui Media Masa Dan Akses Publik</b> |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat   |  |  |  |  |  |
| 8   | Infomrasi disebarluaskan dalam bentuk pengumuman dalam pemanfaatan dana desa   |  |  |  |  |  |
| <b>Sistem Informasi manajemen dan Monitoring Hasil</b>              |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Dalam mengevaluasi dana desa, hanya membandingkan target dengan realisasi/ sesungguhnya                              |  |  |  |  |  |
| 10  | Dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal) |  |  |  |  |  |

Adopsi : Irna Setiyaningrum<sup>74</sup>

## 2. Transparansi

| NO                                       | PERTANYAAN                                 | SS | S | N | TS | STS |
|--|--|----|---|---|----|-----|
| <b>Ada Tidaknya Kerangka Kerja Hukum</b> |  |    |   |   |    |     |
| 11                                       | Adanya peraturan yang mengatur pengelolaan |    |   |   |    |     |

<sup>74</sup> Irna Setiyaningrum. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Di Yogyakarta*. (Skripsi: Yogyakarta, 2017)

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
|   | dana desa   |  |  |  |  |  |
| 12  | Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang dari pengelolaan dana desa   |  |  |  |  |  |
| <b>Adanya Akses Masyarakat</b>  |   |  |  |  |  |  |
| 13  | Adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses rencana dan pengalokasian dana desa   |  |  |  |  |  |
| 14  | Adanya sarana publikasi rencana dan pengalokasian dana desa   |  |  |  |  |  |
| <b>Adanya Audit Yang Independent dan Efektif</b>                          |   |  |  |  |  |  |
| 15  | Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana desa                          |  |  |  |  |  |
| 16  | Adanya satuan pengawasan yang melakukan pengawasan secara independent terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana desa |  |  |  |  |  |
| <b>Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan Dana desa</b> |   |  |  |  |  |  |
| 17  | Masyarakat dilibatkan dalam rencana dan penganggaran pengalokasian dana desa  |  |  |  |  |  |
| 18  | Adanya peran masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan laporan dana desa  |  |  |  |  |  |

Adopsi : Irna Setyaningrum<sup>75</sup>

### 3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

| NO                             | PERTANYAAN   | SS | S | N | TS | STS |
|--------------------------------|--|----|---|---|----|-----|
| <b><i>Exhibiting Trust</i></b> |  |    |   |   |    |     |
| 19                             | Selama ini masyarakat mempercayakan kepemimpinan kepala desa |    |   |   |    |     |

<sup>75</sup> Irna Setyaningrum. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Di Yogyakarta*. (Skripsi: Yogyakarta, 2017)

|                                     |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 20                                  | Kepala desa dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat  |  |  |  |  |  |
| 21                                  | Masyarakat percaya kepada pelaksanaan dan mengelolahan dana desa                                      |  |  |  |  |  |
| <b><i>Acheving Reslust</i></b>      |   |  |  |  |  |  |
| 22                                  | Masyarakat percaya dengan program yang di ajukan oleh kepala desa                                     |  |  |  |  |  |
| 23                                  | Masyarakat mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh kepada desa                                |  |  |  |  |  |
| 24                                  | Masyarakat percaya bahwa kepada desa dapat menampung aspirasi masyarakat                              |  |  |  |  |  |
| 25                                  | Masyarakat percaya dengan hasil kerja yang dilakukan oleh kepada desa                                 |  |  |  |  |  |
| <b><i>Acting With Integrity</i></b> |   |  |  |  |  |  |
| 26                                  | Masyarakat percaya bahwa kepada desa terbuka dalam melakukan pengelolaan dana desa                    |  |  |  |  |  |
| 27                                  | Masyarakat percaya kepala desa mampu bertanggung pada keja yang dilakukan                             |  |  |  |  |  |
| 28                                  | Masyarkat percaya kepala desa tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaannya sebagai kepala desa     |  |  |  |  |  |
| <b><i>Demonstration Concern</i></b> |   |  |  |  |  |  |
| 29                                  | Apakah kepala desa mendengarkan/ menampung aspirasi/ masukkan dari masyarakat                         |  |  |  |  |  |
| 30                                  | Apa program yang dibuat kepala desa mampu membantu membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. |  |  |  |  |  |

## Foto-Foto Dokumentasi Saat Melakukan Penelitian



## Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa



## Poto Bersama Seluruh Perangkat Desa



Poto Saat Penyebaran Kuesioner



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Yogi



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Mirzonantoni



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Riswan



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Suryadi



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Sbdul Gofar



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Ujang Sumardi



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Kasri



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Rupiah



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Erwin Hadi



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Dayu, Nendi, Yanto



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Rumlan



Poto Pengisian Kuesioner Oleh Narasumber Rumlan

## DOKUMENTASI







